

PEMAHAMAN KETAHANAN NASIONAL DALAM UPAYA MEMPERKOKOH KEUTUHAN NKRI

Erman Anom

FIKOM – Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
erman.anom@indonusa.ac.id

ABSTRAK

Ketahanan Nasional dapat ditinjau dari perspektif pencapaian tujuan nasional yang meliputi delapan aspek Astagatra, yang dibagi atas tiga aspek alamiah yaitu: 1. Geografi, 2. Sumber Kekayaan Alam (SKA), dan 3. Demografi; serta lima aspek dari Pancagatra yang bersifat dinamis yaitu 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial Budaya, dan 5. Hankam. Dalam ketahanan nasional antara aspek Trigatra dan Pancagatra mempunyai hubungan timbal balik didalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Demikian pula antar gatra mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat, yang menggambarkan adanya saling ketergantungan serta satu kesatuan yang serasi dan utuh.

Kata Kunci:

Ketahanan, Nasional, Keutuhan dan NKRI

Pendahuluan

Perbatasan NKRI merupakan manifestasi utama kedaulatan dan ketahanan nasional wilayah Negara Indonesia, begitu juga bagi Negara-negara lain di dunia ini. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan, ketahanan nasional dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional.

Dalam konstitusi suatu negara sering dicanumkan pula penentuan batas wilayah. Pemahaman tentang perbatasan negara tidak dapat dilepaskan dari pemahaman ketahanan nasional sebuah negara. Bagi Bangsa NKRI, pemahaman ketahanan nasional tidak boleh lepas landasannya dari ideologi Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam penulisan ini, tidaklah mudah membahas pemahaman ketahanan nasional dalam memperkokoh keutuhan NKRI dengan menjadi suatu topik penting untuk membangun suatu ketahanan masyarakat bangsa yang berlandaskan nasionalisme yang kuat. Pertanyaannya adalah bagaimana memahami dan memaknai kembali konsep

ketahanan nasional untuk tetap kokohnya keutuhan NKRI.

Dengan demikian didalam penulisan ini adalah mengkaji mengenai pemahaman ketahanan nasional dalam upaya memperkokoh NKRI, jika dijabarkan akan menghasilkan sebuah alur pikiran sebagai yang tergambar dalam bagan berikut (Lihat Lampiran Bagan 1 Alur Pikir Pemahaman Ketahanan Nasional Dalam Memperkokoh NKRI).

Pengertian, Hakekat dan Kondisi Tannas Saat Ini

Petahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional.

Konsep ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh serta terpadu dan berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan perkataan lain konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Konsepsi Ketahanan Nasional tersebut di atas pada hakekatnya juga dapat diberlakukan untuk mengkaji ketahanan daerah atau suatu lingkup wilayah yang menjadi bagian dari NKRI sebagai cerminan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan diri bangsa, masyarakat dan negara. Pencapaian kondisi dinamis dilakukan melalui

pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan disini adalah kemampuan masyarakat untuk menumbuhkan serta mengembangkan perangkat nilai masyarakat guna mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata, sedangkan yang dimaksud dengan keamanan adalah kemampuan masyarakat dalam melindungi sistem nilai masyarakatnya terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar serta kemampuan untuk lebih mengembangkannya. Ketahanan diri, bangsa dan negara yang tercapai dengan cukup baik merupakan prakondisi yang memungkinkan tercapainya ketahanan nasional yang diharapkan. Ini berarti pembinaan ketahanan nasional itu dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan dari "bawah" yang menekankan dorongan untuk tumbuh dengan keuletan dan ketangguhan dari masyarakat daerah atau unit-unit wilayah yang lebih kecil, dan pendekatan dari "atas" secara nasional.

Ketahanan Nasional dapat ditinjau dari perspektif pencapaian tujuan nasional yang meliputi delapan aspek Astagatra, yang dibagi atas tiga aspek alamiah yaitu: 1. Geografi, 2. Sumber Kekayaan Alam (SKA), dan 3. Demografi; serta lima aspek dari Pancagatra yang bersifat dinamis yaitu: 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial Budaya, dan 5. Hankam.

Dalam ketahanan nasional antara aspek Trigatra dan Pancagatra mempunyai hubungan timbal balik didalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Demikian pula antar gatra mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat, yang menggambarkan adanya saling ketergantungan serta satu kesatuan yang serasi dan utuh.

Tinjauan atas kedelapan gatra ini akan dibagi lagi menurut kondisi yang terdapat dalam setiap aspek tersebut. Satu hal yang juga mendapat perhatian untuk menilai kondisi ketahanan nasional yaitu adanya dorongan semangat untuk membangun, menjaga perbatasan negara dengan memperbaiki keadaan, sehingga lebih baik dari keadaan sebelumnya, seperti cita-cita untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat.

Sebagaimana diketahui ketangguhan ketahanan nasional atau daerah dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam kajian ini dapat diterapkan kualitatif dan kuantitatif, sehingga derajat ketahanan nasional pada bidang perbatasan negara untuk memperkokoh NKRI dapat diukur pemahamannya dan dapat dinyatakan dalam sejumlah parameter dan indikator yang terukur (*measurable*).

Jadi hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Sedangkan yang menjadi hakikat konsepsi ketahanan nasional adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam sebuah aspek kehidupan nasional.

Pemahaman Perbatasan

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk menuju kepada ketahanan nasional yang kokoh. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain :

- a. Mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara dan ketahanan nasional.
- b. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.
- c. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara.
- d. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan, keamanan, dan ketahanan nasional.

Ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional dalam kerangka NKRI. Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi *concern* setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain.

Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena

penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses *nation state building* terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (*neighbourhood countries*). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Sabarno, 2001).

Pembahasan

Kondisi Daerah Perbatasan Saat Ini

Pada umumnya daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (*transnational crimes*).

Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek Pancagatra yaitu:

- Aspek Ideologi.

Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pada saat ini penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu metoda pembinaan ideologi Pancasila yang terus-menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa.

- Aspek Politik.

Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.

- Aspek Ekonomi.

Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain:

- 1) Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 3) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
- 4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (*blank spot*).

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan, rasa nasionalisme dan ketahanan nasional. Maka tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris.

- Aspek Sosial Budaya.

Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga.

- Aspek Pertahanan dan Keamanan.

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Daerah perbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang

terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya.

Permasalahan yang Dihadapi

Penanganan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Lebih memprihatinkan lagi keadaan masyarakat sekitar daerah perbatasan negara, seperti lepas dari perhatian dimana penanganan masalah daerah batas negara menjadi *domain* pemerintah pusat saja, pemerintah daerahpun menyampaikan keluhannya, karena merasa tidak pernah diajak serta dan masyarakatnya tidak mendapat perhatian. Merekapun bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam membina masyarakat di perbatasan? Siapa yang harus menyediakan, memelihara infrastruktur di daerah perbatasan, terutama daerah yang sulit dijangkau, sementara mereka tidak tahu dimana batas-batas fisik negaranya ?

Kenyataan di lapangan ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Dalam hal ini, masalah koordinasi yang kurang mantap dan terpadu menjadi sangat perlu untuk ditelaah lebih lanjut.

Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sebagaimana hendaknya melibatkan banyak instansi (Departemen/LPND), baik instansi terkait di tingkat pusat maupun antar instansi pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, belum terkoordinasinya pengembangan kawasan perbatasan antar negara dengan kerjasama ekonomi sub regional, seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara Malaysia Timur dengan Kalimantan dengan KK Sosek Malindo dan BIMP-EAGANYA, serta dengan rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau di Kalimantan Barat dan KAPET SASAMBA di Kalimantan Timur yang secara konseptual dan operasional perlu diarahkan dan dirancang untuk menumbuhkan daya saing, komplementaritas dengan wilayah mitranya yang ada di negara tetangga.

Selain isu koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan, komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi dalam pembangunan wilayah perbatasan telah mengalami reorientasi yaitu dari orientasi keamanan (*security approach*) menjadi orientasi kesejahteraan/pembangunan *prosperity/development approach*). Dengan adanya reorientasi ini diharapkan

penanganan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :

- a. Pendekatan keamanan yang diterapkan Mabes TNI walaupun berbeda namun diharapkan dapat saling menunjang dengan pendekatan pembangunan.
- b. Penanganan perbatasan negara selama ini ternyata tidak tercipta suatu keterkaitan (*interface*) dengan program pengembangan kawasan dan kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA, yang sebenarnya sangat relevan untuk dikembangkan secara *integrative* dan komplementatif.
- c. Terkait dengan beberapa upaya yang telah disepakati di dalam pengembangan kawasan perbatasan antar negara, diperlukan pertimbangan terhadap upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan melalui penanganan yang bersifat lintas sektor dan lintas pendanaan.

Isu pengembangan daerah perbatasan lainnya secara umum diilustrasikan sebagai berikut :

1. Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 hektare hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia (Media Indonesia, 21 Juni 2001).
2. Pengelolaan sumber daya alam belum terkoordinasi antar pelaku sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang kurang baik untuk pengembangan daerah dan masyarakat.
3. Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansi tersebut dapat lebih efektif. Contohnya, Perum Perhutani yang ditugasi Pemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999, namun tugas yang dipikul Perhutani meliputi menata kembali wilayah perbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih.
4. Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalam program kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan.

5. Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap hankam dan politis mengingat fungsinya sebagai *outlet* terdepan Indonesia, dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia.
6. Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia berlatar belakang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian Malaysia lebih berkembang.
7. Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah negara pemicu orientasi perekonomian masyarakat, seperti di Kalimantan, akses keluar (ke Malaysia) lebih mudah dibandingkan ke ibukota kecamatan/kabupaten di wilayah Kalimantan.
8. Tidak tercipta keterkaitan antar kluster social ekonomi baik kluster penduduk setempat maupun kluster binaan pengelolaan sumber daya alam di kawasan, baik keterkaitan ke dalam maupun dengan kluster pertumbuhan di negara tetangga.
9. Adanya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan aspek ke-amanan dan politis, maupun pelanggaran dan eksploitasi sumber daya alam yang lintas batas negara, baik sumber daya alam darat maupun laut.

Berdasarkan isu strategis dalam pengelolaan daerah perbatasan negara selama ini, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang menonjol di daerah perbatasan sebagai berikut :

- a. Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut maupun darat.
- b. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitasnya.
- c. Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti penyelundupan kayu/*illegal lodging*, tenaga kerja dan lain-lain.
- d. Pengelolaan perbatasan belum optimal, meliputi kelembagaan, kewenangan maupun program.
- e. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil hutan dan kekayaan laut.
- f. Munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal yang memperbesar terjadinya *out migration*, “*economic asset*” secara ilegal.
- g. Mental dan professional aparat (*stake holders* di pusat dan daerah serta aparat keamanan di pos perbatasan).

Perkembangan Lingkungan Strategis

Masalah perbatasan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik internasional, regional maupun nasional. Dalam era globalisasi, dunia makin terorganisasi dan makin tergantung satu sama lain serta saling membutuhkan. Konsep saling keterkaitan dan ketergantungan dalam masyarakat internasional berpengaruh dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berbagai negara sambil tetap mempertahankan identitas serta batas-batas teritorial negaranya, mereka membuka semua hambatan fisik, administrasi dan fiskal yang membatasi gerak lalu lintas barang dan orang.

Perkembangan kerjasama ASEAN diharapkan akan dapat menciptakan keterbukaan dan saling pengertian sehingga dapat dihindarkan terjadinya konflik perbatasan. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya hubungan masyarakat perbatasan baik dari sudut sosial budaya maupun ekonomi. Dalam era reformasi dan dengan kondisi kritis yang masih berkepenjangan, penanganan masalah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal.

Strategi Pengembangan Daerah Perbatasan Untuk Kokohnya Integritas Nasional

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Konsepsi pengelolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu:

1. Politik Pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI.
2. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah.
3. Politik luar negeri yang bebas-aktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh sebab itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan dan berdasarkan tiga hal tersebut di atas.

Pembentukan Kelembagaan Khusus menangani Masalah Perbatasan. Persoalan pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan RI, sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah. Pengelolaan perbatasan antar negara masih bersifat

sementara (*ad-hoc*) dengan *leading* sektor dari berbagai instansi terkait. Pada saat ini, lembaga-lembaga yang menangani masalah perbatasan antar negara tetangga adalah:

1. *General Border Committee* RI-PNG diketuai oleh Panglima TNI.
2. *Join Border Committee* RI-PNG (JBC) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.
3. *Join Border Committee* RI-UNTAET (Timtim) diketuai oleh Dirjen Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri.
4. *Join Commisison Meeting* RI – Malaysia (JCM) diketuai oleh Departemen Luar Negeri yang sifatnya kerjasama bilateral.

Dalam penanganan masalah perbatasan agar dapat berjalan secara optimal perlu dibentuk lembaga yang dapat berbentuk :

Forum/setingkat Dewan dengan keanggotaan terdiri dari pimpinan Institusi terkait. Dewan dibantu oleh sekretariat Dewan. Bentuk ini mempunyai kelebihan dan penyelesaian masalah lebih terpadu dan hasilnya lebih maksimal, karena didukung oleh instansi terkait. Sedangkan kelemahannya tidak operasional, keanggotaan sering berganti-ganti, sehingga kurang terjadi adanya kesinambungan kegiatan.

Badan (LPND) yang mandiri terlepas dari institusi lain dan langsung di bawah presiden. Bentuk ini mempunyai kelebihan bersifat otonom, hasil kebijakannya bersifat operasional dan personil terdiri dari sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang kerjanya. Sedangkan kelemahannya dapat terjadi pengambil-alihan sektor, sehingga kebijakan yang ditetapkan kurang didukung oleh sektor terkait.

Mewujudkan sabuk pengaman (koridor). Dalam menjaga kedaulatan Negara dan keamanan. Untuk lebih mewujudkan keamanan negara RI Khususnya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga perlu diciptakan sabuk pengaman yang berfungsi sebagai sarana kontrol dimulai dari titik koordinat ke arah tertentu sepanjang perbatasan.

Penyusunan Program Secara Komprehensif dan Integral. Penyusunan program secara integral dan komprehensif dalam hal ini melibatkan sektor-sektor yang terkait dalam masalah penanganan perbatasan, seperti masalah kependudukan, lalu lintas barang/perdagangan, kesehatan, ke-amanan, konservasi sumber daya alam.

Penataan batas negara dalam upaya memperkokoh keutuhan integritas NKRI. Penataan batas seperti yang telah diuraikan di atas berupa batas fisik baik batas alamiah ataupun buatan. Dengan

kejelasan batas-batas tersebut akan memperjelas kedaulatan fisik wilayah negara RI.

Pembangunan Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Perbatasan Berbasis Kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain:

1. Potensi sumber daya alam setempat
2. Kelompok swadaya masyarakat.

Sedangkan bentuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan yang berbasis kerakyatan antara lain:

Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah ada. Pemberdayaan, pendampingan dan penguatan peran serta perempuan dalam kegiatan perekonomian atau sosial.

Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan. Menghidupkan peran lembaga keuangan mikro dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian. Identifikasi potensi dan pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah perbatasan.

Sistem Keamanan Perbatasan

Sistem keamanan perbatasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan sistem ke-amanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga antara lain adalah Geografi, letak geografi Indonesia sangat strategis, karena berada di jalur perdagangan internasional. Hal-hal penting yang berkaitan dengan letak geografi antara lain : di wilayah laut, berbatasan dengan 10 negara (India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia, Timor Lorosae). Di wilayah darat, berbatasan dengan 3 negara (Malaysia, PNG dan Timor Lorosae). Jumlah pulau 17.508, panjang pantai 80.791 Km, luas wilayah termasuk ZEE 7,7 juta Km lautan 5,8 juta Km. Perbandingan luas wilayah darat dan laut adalah 1: 3.

- b. Sumber kekayaan alam di perbatasan perlu mendapatkan pengamanan/perhatian serius yang meliputi :
- Potensi pertambangan umum/migas
 - Potensi kehutanan
 - Potensi kehutanan/perkebunan
 - Potensi perikanan
- Sabarno Hari, “Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan”, <http://www.perbatasan.com>, 21 Mei 2001.
- Salim, Hairus, dan Suhadi, “Membangun Pluralisme dari Bawah”, Modul belajar bersama, LKIS, Yogyakarta, 2007.

Kesimpulan

Daerah perbatasan dalam ketahanan nasional NKRI merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan nasional, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan dalam rangka untuk menjamin tetap utuh memperkokoh NKRI. Penanganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan ketahanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.

Untuk itu pemahaman ketahanan nasional dibidang perbatasan negara bagi bangsa Indonesia perlu diselaraskan dan harus berlandaskan pada cita-cita pendirian Negara, ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Daftar Pustaka

- Geostrategi & Tannas, “Modul 3 Konsepsi dan Tolak Ukur Ketahanan Nasional”, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- Patria, Nezar, dan Andi Arief, ”Antoni Gramsci: Negara Hegemoni”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Pellindou P. Jack A., ”Peningkatan Kerjasama Perbatasan Antar Negara Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional”, Lemhanas, Jakarta, 2002.